

GENEALOGI NEGARA BANGSA



Arthuur Jeverson Maya

GENEALOGI NEGARA BANGSA

Penulis:

Arthuur Jeverson Maya



UKI PRESS

Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2026

GENEALOGI NEGARA BANGSA

Penulis:

Arthuur Jeverson Maya

Editor:

Adrianus Lengu Wene

Riskey Oktavian

ISBN: 978-634-7589-09-5

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta - 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Buku ini berangkat dari satu kegelisahan mendasar: mengapa negara bangsa, sebagai bentuk politik modern, diterima seolah-olah ia merupakan keniscayaan sejarah. Dalam diskursus politik global, negara bangsa kerap diperlakukan sebagai puncak rasionalitas politik, sebagai bentuk paling matang dari organisasi kekuasaan, dan sebagai prasyarat mutlak bagi keteraturan dunia. Ia diajarkan dalam buku-buku teks sebagai hasil evolusi panjang peradaban, diasumsikan sebagai fondasi hukum internasional, dan dijadikan rujukan normatif dalam perbincangan tentang demokrasi, kedaulatan, dan perdamaian. Namun, justru karena penerimaan yang begitu luas dan nyaris tanpa resistensi inilah, negara bangsa menjadi objek yang layak dicurigai.

Buku ini tidak lahir dari keinginan untuk menolak negara bangsa secara normatif, apalagi untuk menawarkan alternatif utopis yang tercerabut dari realitas politik. Sebaliknya, buku ini lahir dari kebutuhan untuk membongkar bagaimana negara bangsa menjadi mungkin sebagai kebenaran. Dengan kata lain, pertanyaan yang diajukan bukanlah apakah negara bangsa baik atau buruk, melainkan bagaimana ia diproduksi, dinormalisasi, dan dipertahankan sebagai satu-satunya bentuk politik yang dianggap sah dalam tatanan global modern.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, buku ini memilih pendekatan genealogi. Genealogi, sebagaimana dipahami dalam tradisi pemikiran pascastruktural, tidak mencari asal-usul yang murni atau kronologi yang rapi. Ia tidak berupaya menelusuri garis lurus sejarah dari masa lalu ke masa kini.

Genealogi justru bekerja dengan membongkar lapisan-lapisan diskursus, relasi kuasa, dan sistem pengetahuan yang memungkinkan suatu tatanan tampil alamiah dan tak terelakkan. Dalam kerangka ini, negara bangsa dipahami bukan sebagai hasil kemajuan linear, melainkan sebagai formasi historis yang lahir dari konflik, krisis, kompromi, dan kekerasan simbolik.

Bagian awal buku ini memulai pembahasan dari kekuasaan sebagai mitos. Kekuasaan tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang sepenuhnya material atau semata-mata terletak pada institusi negara, melainkan sebagai konstruksi diskursif yang bekerja melalui bahasa, simbol, dan persetujuan kolektif. Kekuasaan modern jarang tampil dalam bentuk paksaan terbuka. Ia lebih sering hadir sebagai kebenaran yang disepakati, sebagai norma yang diterima, dan sebagai logika yang dianggap rasional. Dalam konteks ini, kemenangan demokrasi liberal pasca-Perang Dingin dibaca bukan hanya sebagai peristiwa geopolitik, tetapi sebagai momen krusial dalam pembentukan rezim kebenaran global.

Pasca runtuhnya Uni Soviet, dunia seolah memasuki fase di mana satu sistem pemikiran memperoleh status universal. Demokrasi liberal dan kapitalisme tidak lagi diposisikan sebagai salah satu pilihan ideologis, melainkan sebagai bahasa tunggal dunia. Dalam bahasa genealogi, inilah momen ketika persamaan diproduksi sebagai kebenaran. Negara-negara, masyarakat, dan individu didorong untuk mengejar pengakuan melalui penyesuaian terhadap standar-standar yang ditetapkan oleh tatanan liberal global. Kebebasan, hak asasi manusia, pasar bebas, dan pemerintahan demokratis dipresentasikan sebagai nilai-nilai yang bersifat netral, rasional, dan universal.

Namun, buku ini menunjukkan bahwa di balik klaim universalitas tersebut, terdapat mekanisme kuasa yang bekerja secara sistematis. Institusi-institusi global seperti IMF, *World Bank*, WTO, dan berbagai rezim tata kelola global lainnya tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, melainkan sebagai perangkat normalisasi. Melalui bahasa pembangunan, stabilitas, dan reformasi struktural, negara-negara didisiplinkan untuk menyesuaikan diri dengan logika kapitalisme global. Dalam proses ini, negara bangsa tidak melemah, melainkan justru diperkuat sebagai agen yang bertanggung jawab menginternalisasi dan menerapkan norma-norma global tersebut ke dalam masyarakatnya sendiri.

Genealogi kemudian membawa pembaca mundur ke momen yang lebih awal: Westphalia. Perjanjian Westphalia sering diperlakukan sebagai titik awal sistem negara bangsa modern. Dalam banyak literatur hubungan internasional, Westphalia dipresentasikan sebagai fondasi hukum internasional yang rasional dan sekuler. Namun, buku ini mengajukan pembacaan yang berbeda. Westphalia tidak dipahami sebagai kelahiran perdamaian universal, melainkan sebagai kompromi praktis atas kelelahan perang di Eropa. Ia adalah solusi lokal yang kemudian diproduksi ulang sebagai prinsip global.

Westphalia menandai pergeseran penting dalam cara kekuasaan dilegitimasi. Iman tidak dihapus dari politik, tetapi ditransformasikan. Kedaulatan negara menggantikan otoritas religius universal, namun struktur sakral tetap bertahan dalam bentuk hukum, wilayah, dan simbol kenegaraan. Negara menjadi tubuh baru dari kekuasaan lama. Dalam konteks ini, sekularisasi tidak berarti ketiadaan iman, melainkan perubahan bentuk iman. Konstitusi, hukum, dan kedaulatan

berfungsi sebagai dogma baru yang mengatur kehidupan politik.

Pembacaan ini menjadi semakin penting ketika dibandingkan dengan kosmologi politik lain di luar Eropa. Buku ini menunjukkan bahwa Cina, dunia Islam, dan peradaban non-Barat lainnya memiliki konsep keteraturan yang berbeda jauh sebelum Westphalia. Cina, misalnya, mengembangkan tatanan hierarkis yang berpusat pada figur Kaisar sebagai simbol keteraturan kosmik. Dunia Islam membangun visi tatanan universal berbasis iman yang melampaui batas teritorial. Fakta bahwa model Westphalia kemudian diadopsi secara global tidak menunjukkan superioritas inherennya, melainkan keberhasilan historis Eropa—dan kemudian Amerika Serikat—dalam memaksakan satu rezim kebenaran sebagai standar dunia.

Dalam perkembangan berikutnya, Amerika Serikat tampil sebagai aktor sentral dalam menjaga dan memperluas tatanan negara bangsa. Buku ini tidak memposisikan Amerika Serikat semata-mata sebagai hegemon militer atau ekonomi, melainkan sebagai kurator tatanan global. Amerika Serikat memproduksi dirinya sebagai penjaga perdamaian, pembela kebebasan, dan promotor demokrasi. Narasi ini berakar pada tradisi iman Puritan, yang memandang Amerika sebagai “kota di atas bukit” dengan misi moral bagi dunia. Dalam bentuk modern, iman tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa demokrasi, hak asasi manusia, dan keamanan internasional.

Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam buku ini, klaim moral tersebut selalu diiringi oleh paradoks. Intervensi kemanusiaan, perang melawan teror, dan kebijakan keamanan global sering kali menghasilkan kekerasan baru dan eksklusi yang lebih luas. 9/11 menjadi momen penting yang

memperlihatkan rapuhnya klaim akhir sejarah. Musuh tidak lagi datang dalam bentuk negara ideologis seperti Uni Soviet, melainkan dalam bentuk aktor non-negara yang menantang tatanan global dari luar kerangka Westphalia. Peristiwa ini membuka kembali ruang bagi ekspansi kekuasaan negara melalui logika keamanan dan keadaan darurat.

Resistensi terhadap tatanan liberal global tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Gerakan anti-globalisasi, *Occupy Wall Street*, dan kritik terhadap ketimpangan ekonomi global menunjukkan bahwa rezim kebenaran liberal tidak sepenuhnya diterima bahkan oleh masyarakat yang menjadi pusatnya. Di sisi lain, kebangkitan Cina dan konfrontasi geopolitik dengan Rusia menantang asumsi bahwa dunia telah memasuki fase unipolar yang stabil. Persaingan ini memperlihatkan bahwa negara bangsa tetap menjadi aktor utama dalam politik global, meskipun ia beroperasi dalam kondisi yang semakin kompleks.

Buku ini juga menaruh perhatian pada transformasi kekuasaan di era digital. Perkembangan teknologi informasi, jaringan global, dan ekonomi digital telah mengubah cara kekuasaan bekerja. Batas antara ruang dan waktu semakin kabur, sementara pengawasan menjadi semakin halus dan terinternalisasi. Negara tidak lagi hanya mengandalkan aparat fisik, tetapi juga data, algoritma, dan jaringan. Dalam konteks ini, negara bangsa tidak menghilang, tetapi beradaptasi menjadi negara jaringan yang mengelola populasi melalui mekanisme baru.

Untuk memahami negara bangsa sebagai bentuk politik modern, pembacaan tidak dapat berhenti pada peristiwa-peristiwa modern semata. Genealogi menuntut penelusuran yang lebih jauh ke belakang, ke lapisan-lapisan awal di mana

relasi antara iman, ruang, dan kekuasaan mulai dikodekan. Negara bangsa bukanlah hasil loncatan historis yang tiba-tiba muncul di Eropa abad ketujuh belas, melainkan puncak dari proses panjang pengaturan kehidupan manusia melalui tanda, larangan, dan pengelolaan ruang sosial.

Narasi keteraturan paling awal dapat dilacak pada kisah Eden. Eden bukan sekadar cerita asal-usul manusia, melainkan representasi ruang normatif pertama di mana kehidupan diatur melalui batas. Larangan untuk tidak memakan buah pengetahuan bukan hanya aturan moral, melainkan bentuk awal hukum. Kekuasaan bekerja bukan melalui kekerasan, tetapi melalui ketaatan. Pengusiran dari Eden menandai momen krusial dalam genealogi politik: manusia dipisahkan dari ruang ideal dan dipaksa membangun keteraturan di luar dirinya. Sejak saat itu, kehidupan manusia selalu berada dalam ketegangan antara keteraturan yang diidealkan dan keteraturan yang harus diciptakan.

Peralihan berikutnya terjadi pada kemunculan Kota Henokh, yang kerap dipahami sebagai kota pertama dalam sejarah simbolik manusia. Kota menandai perubahan radikal dalam cara kekuasaan bekerja. Jika Eden adalah ruang yang diatur oleh larangan transenden, kota adalah ruang yang diatur oleh struktur buatan. Dengan kota, kekuasaan mulai dilekatkan pada ruang fisik: dinding, jalan, pusat kegiatan, dan pembagian wilayah. Kota memungkinkan pengawasan, pencatatan, dan diferensiasi sosial. Di sinilah kekuasaan mulai terinstitusionalisasi, bukan lagi sebagai kehadiran ilahi, melainkan sebagai tata ruang dan organisasi kehidupan.

Negara-kota Yunani kemudian memperdalam proses ini dengan menjadikan ruang politik sebagai ruang wacana. Polis tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai

arena pembentukan kebenaran politik. Di sinilah konsep warga, hukum, dan partisipasi dirumuskan. Namun, polis juga memperlihatkan sisi gelap dari rasionalitas politik. Demokrasi Yunani dibangun di atas eksklusi sistematis terhadap mereka yang tidak dianggap layak menjadi subjek politik. Genealogi negara bangsa harus membaca polis bukan sebagai asal-usul demokrasi yang murni, melainkan sebagai laboratorium awal di mana kebebasan dan pengecualian diproduksi secara bersamaan.

Romawi membawa genealogi ini ke tahap yang lebih kompleks. Kekuasaan Romawi tidak lagi bertumpu pada wacana semata, melainkan pada hukum dan administrasi. Imperium Romawi menjadikan hukum sebagai instrumen utama pengelolaan wilayah dan populasi. Kewargaan Romawi adalah teknologi kekuasaan yang memungkinkan integrasi sekaligus diferensiasi. Hukum berfungsi sebagai tanda universal yang mengikat subjek tanpa memerlukan legitimasi iman langsung, namun tetap bersifat sakral. Dalam Romawi, negara mulai tampil sebagai mesin impersonal yang bekerja melalui prosedur dan aturan.

Runtuhnya Romawi tidak mengakhiri genealogi ini, melainkan menggeser pusat legitimasi kembali ke iman. Abad pertengahan memperlihatkan keterikatan erat antara kekuasaan dan iman, di mana kedaulatan dipahami sebagai mandat ilahi. Ketegangan antara otoritas religius dan kekuasaan politik menjadi ciri utama periode ini. Dari ketegangan inilah kemudian lahir perjanjian Westphalia. Westphalia tidak menghapus iman dari politik, melainkan mentransformasikannya. Kedaulatan negara menggantikan otoritas religius universal, namun struktur sakral tetap dipertahankan dalam bentuk hukum, wilayah, dan simbol

kenegaraan. Negara bangsa muncul sebagai iman yang disekulerkan.

Dalam perkembangan modern, Amerika Serikat tampil sebagai aktor yang tidak hanya mewarisi tatanan Westphalia, tetapi juga berperan sebagai penjaganya. Amerika Serikat memproduksi dirinya sebagai kurator tatanan negara bangsa global. Demokrasi liberal, hak asasi manusia, dan pasar bebas dipresentasikan sebagai nilai-nilai universal yang harus dijaga demi keteraturan dunia. Peran ini tidak hanya dijalankan melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi melalui produksi narasi moral yang berakar pada tradisi iman Puritan tentang “kota di atas bukit.” Negara bangsa tidak sekadar dipertahankan, tetapi disakralkan sebagai satu-satunya bentuk politik yang sah.

Dengan demikian, genealogi negara bangsa yang dibangun dalam buku ini bergerak dari ruang normatif Eden, melalui teknologi kota Henokh, rasionalitas polis Yunani, legalitas Romawi, kedaulatan Westphalia, hingga peran Amerika Serikat sebagai penjaga tatanan global. Rangkaian ini menunjukkan bahwa negara bangsa adalah hasil akumulasi panjang relasi antara iman, ruang, hukum, dan kekuasaan. Ia bukan keniscayaan alamiah, melainkan konstruksi historis yang terus direproduksi sebagai kebenaran.

Tambahan genealogi ini dimaksudkan bukan untuk menutup perdebatan, melainkan untuk membuka medan pembacaan yang lebih luas. Dengan memahami bahwa negara bangsa memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada modernitas Eropa, pembaca diajak untuk melihat bahwa tatanan politik global selalu berada dalam proses pembentukan dan pertarungan makna. Dalam pengertian inilah buku ini bergerak: bukan untuk menghakimi, melainkan

untuk membongkar bagaimana kekuasaan bekerja melalui waktu, ruang, dan iman.

Mengakhiri pembahasan, buku ini kembali pada pertanyaan awal tentang keberlanjutan negara bangsa. Dengan merujuk pada pemikiran Arnold Toynbee, buku ini mengingatkan bahwa tidak ada peradaban yang abadi. Setiap tatanan membawa benih disintegrasinya sendiri. Namun, genealogi tidak dimaksudkan untuk meramalkan kehancuran, melainkan untuk membuka kesadaran kritis. Dengan memahami bahwa negara bangsa adalah hasil konstruksi historis, pembaca diajak untuk melihat bahwa masa depan politik global tidak pernah tertutup.

Prakata ini ditulis dengan harapan bahwa buku ini dapat menjadi ruang dialog kritis bagi pembaca yang tidak puas dengan narasi-narasi mapan tentang negara, kedaulatan, dan kekuasaan. Ia tidak menawarkan jawaban final, tetapi menyediakan perangkat konseptual untuk mempertanyakan apa yang selama ini dianggap wajar. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk mempertanyakan kebenaran yang mapan menjadi bentuk kebebasan intelektual yang paling mendasar.

Salam Kasih

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI.....	x

BAB I	GENEALOGI PERSAMAAN : AMERIKA SERIKAT, DISKURSUS DAN SISTEM TANDA	1
	A. Refleksi Rezim Kuasa	1
	B. Diskursus Persamaan	17
	C. Sistem Tanda.....	25
	D. Genealogi.....	29
	E. Tuhan Menyejarah dan Asal Usul Negara Bangsa	34
BAB II	ASAL USUL BANGSA EDEN : TUHAN MEMBANGUN PERADABAN.....	41
	A. Kudeta Kekuasaan Adam.....	50
	B. Peradaban Kota Henokh	57
	C. Penanda Kain: Diskursus Kebebasan dan Kedaulatan	69
BAB III	NEGARA KOTA YUNANI : DEWA ZEUS MEMBANGUN PERADABAN.....	81
	A. Mitologi Dewi Athena	90
	B. Negara Kota Athena dan Sistem Demokrasi.....	99
	C. Mitologi Dewa Ares.....	112

D. Negara Kota Sparta dan Sistem Militer Hoplites & Agoge	118
--------------------------------------------------------------------	-----

BAB IV NEGARA KOTA ROMAWI : JUPITER MEMBANGUN PERADABAN 131

A. Era Kerajaan Romawi.....	139
B. Era Republik Romawi	193
C. Era Kekaisaran Romawi	256

BAB V NEGARA BANGSA WESTPHALIA 309

A. Westphalia: Wajah Cantik Imperium	311
B. Tubuh Tuhan yang Disulap Menjadi Negara.....	314
C. Negara sebagai Mesin Disipliner: Tubuh Sosial dan Rezim Representasi ..	336
D. Diskursus Pemerintahan Melalui Tanda: Administrasi, Statistik, dan Tubuh Sosial	373
E. Produksi Kronopolitik; Waktu, Kalender, dan Penanggalan Pasca- Westphalia.....	383
F. Kartografi, Pemetaan, dan Produksi Ruang Nasional.....	409
G. Geografi Ancaman dan Militerisasi Spasial dalam Politik Pasca- Westphalia.....	424
H. Retakan Negara Bangsa: Paralogisme Identitas dan Krisis Representasi.....	442

BAB VI	NEGARA BANGSA SEBAGAI T	
	ATANAN AMERIKA SERIKAT	469
A.	Proyeksi Kuasa Amerika: Westphalia sebagai Fondasi Global Baru	470
B.	Institusionalisasi Tatanan: PBB, <i>Bretton Woods</i> , dan NATO	497
C.	Narasi Teologis Baru: Demokrasi, Kebebasan, dan Misi Penyelamatan	508
D.	Manifest Destiny Global: Ekspansionisme Simbolik dan Sakralisasi Wilayah.....	524
E.	Kapitalisme sebagai Iman Negara: Reproduksi Ekonomi oleh Negara Bangsa	559
F.	Militerisme dan Logika Exceptionalism: Pax Americana.....	591
G.	Produksi Subjek Global: Warga Dunia dalam Bayang-Bayang Amerika.....	621
H.	Krisis Simbolik dan Retakan Globalisasi: Apakah Amerika Masih Penyelamat?.....	663
 BAB VII	 PENUTUP	 711
 DAFTAR PUSTAKA		 727
PROFIL PENULIS		739

Buku ini dipersembahkan kepada mereka yang tidak pernah menjadi objek dari pemikiran ini, melainkan subjek dari seluruh keberanian untuk terus menulis, bertanya, dan meragukan dunia :

Sescha Manoa Maya

Jesicha Vielenesa Sofie Maya

Jesicha Edelweis Maya

Jesicha Yueyin Xianglu Maya

BAB I

GENEALOGI PERSAMAAN : AMERIKA SERIKAT, DISKURSUS DAN SISTEM TANDA

*In the beginning was the Word,
and the Word was with God, and the Word was God.*

The same was in the beginning with God.

-St. John

A. Refleksi Rezim Kuasa

Kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu mencari bentuk untuk menetap. Dalam sejarah panjang manusia, kekuasaan berpindah dari iman ke hukum, dari mitos ke institusi, dari simbol ke teritori. Apa yang hari ini disebut negara bangsa bukanlah kelahiran baru, melainkan bentuk paling mutakhir dari upaya lama manusia untuk menstabilkan kekuasaan melalui tanda-tanda yang dapat diwariskan. Dalam pengertian ini, negara bangsa adalah arsip hidup dari relasi kuasa yang jauh lebih tua daripada modernitas itu sendiri.

Genealogi negara bangsa tidak dimulai dari perjanjian, konstitusi, atau perang modern, melainkan dari cara manusia pertama kali memahami keteraturan dan ketaatan. Kekuasaan mula-mula bekerja bukan dengan memerintah, tetapi dengan meyakinkan; bukan dengan memaksa, tetapi dengan menanamkan makna. Ketika makna tersebut diterima dan diulang, ia berubah menjadi kebenaran. Dari sinilah

kekuasaan memperoleh daya tahannya—ia hidup dalam persetujuan, bukan semata dalam dominasi.

Seiring waktu, kekuasaan membutuhkan wadah yang lebih stabil. Ia menuntut ruang, batas, dan identitas. Negara bangsa muncul sebagai jawaban historis atas kebutuhan itu: sebuah bentuk politik yang mengklaim rasionalitas, namun tetap beroperasi melalui mitos-mitos baru tentang kedaulatan, persamaan, dan keteraturan. Demokrasi, hukum, dan hak asasi tidak berdiri di luar genealogi ini, melainkan menjadi bahasa modern yang melanjutkan kerja lama kekuasaan dalam bentuk yang lebih halus dan universal.

Dengan demikian, pembacaan terhadap kekuasaan dalam konteks Amerika Serikat, diskursus global, dan sistem tanda tidak dapat dipisahkan dari penelusuran asal-usul yang lebih dalam. Negara bangsa tidak hadir sebagai titik awal, tetapi sebagai simpul. Ia mengikat Eden, kota-kota awal, polis Yunani, imperium Romawi, dan tatanan Westphalia ke dalam satu narasi panjang tentang bagaimana kekuasaan terus menemukan cara baru untuk membenarkan dirinya. Di sinilah genealogi bekerja: bukan untuk menutup sejarah, tetapi untuk membuka kembali apa yang selama ini dianggap telah selesai.

Kekuasaan adalah mitos. Fakta bahwa di dalam ruang dan waktu yang tidak begitu panjang sejak deklarasi kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin berkontribusi pada sejarah sistem pemikiran. Di mana, suatu kebudayaan berhenti sejenak untuk berpikir tentang tanda-tanda persamaan melalui bahasa. Ia memberikan tanda pengenal bahwa sejarah terkonsentrasi pada satu tradisi pemikiran yaitu demokrasi liberalisme. Kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal mengawali keterputusan sistem pemikiran permanensi komunisme. Dengan demikian,

perjuangan untuk memperoleh pengakuan melalui gagasan universal dalam akumulasi tanpa akhir dijadikan sebagai proyek persamaan kebenaran. Selanjutnya, mesin hegemoni, panoptikon, dan simtoxa menyerupai alat kuasa berkualitas tinggi dalam memproduksi relasi tanda dan imajinasi.

Rezim kebenaran yang kemudian menjadi suatu tatanan universal dimulai dari rasa pesisme dan krisis intelektual pada abad ke 19. Selanjutnya membawa kita pada sistem-sistem berpikir intelektual yang membuat abad 20 sebagai abad kaum pesimis historis yang mendalam. Sejarah adalah masa kini. Respon terhadap pesisme kemajuan sejarah yang bermandikan darah dan kematian dalam perang yang besar mengantarkan Amerika Serikat pada optimisme ideologis yang berharap akan adanya perubahan. Sejarah perang dan revolusi abad ke 19 berbeda dengan abad sebelumnya. Semangat 1776 atau cita-cita revolusi Prancis akan menghapuskan para tiran, otokrat, dan takhyul para pemimpin agama dunia. Kebutaan dalam kepemimpinan otokrasi tereformasi dalam kepemimpinan sendiri secara logis, di mana, semangat revolusi menciptakan kebebasan dan kesetaraan. Kondisi ini tidak jauh berbeda setelah abad 19, di mana perang perluasan peradaban yang dilakukan sebagai perang Napoleon dapat diinterpretasikan sebagai perang yang memberikan hasil progresif. Sebab, sejarah perang tersebut berdampak pada pemerintahan berbentuk republik.

Krisis dan pesisme datang dari berbagai filsuf, seorang wartawan yang tersohor bernama Norman Angell dengan tulisan berjudul *The Great Illusion* diterbitkan sebelum Perang Dunia I menyebutkan bahwa perdagangan bebas telah membuat ekspansi kekuasaan menjadi usang, dan perang secara ekonomi menjadi tidak rasional (Fukuyama 2004, 23).

Pesimisme ekstrem telah memengaruhi sistem pemikiran di Eropa dalam penerapan liberalisme Adam Smith. Setidaknya hal tersebut datang dari kekejaman yang menciptakan analogi-analogi penghancur harapan. Dilanjutkan dengan kisah Perang Dunia I yang berkontribusi meningkatkan depresi ekstrim di tanah Eropa, sehingga kehilangan kepercayaan diri untuk bangkit dan menyejarah. Dampak yang ditimbulkan bukan kepada kehancuran bangsa Jerman, Austria, dan Rusia, namun lebih kepada tekanan secara psikologis.

Berakhirnya Perang Dunia I bukan membawa negara bangsa di Eropa pada tatanan yang lebih baik, namun munculnya berbagai kejahatan-kejahatan baru yang mewarnai tatanan di Eropa, hingga penguatan sumber daya kekuatan negara bangsa yang sebelumnya tidak ada. Kekuatan yang mengerikan datang dari senjata-senjata penghancur, bom, dan alat perang berbasis teknologi. Ini adalah abad dengan penyerupaan totaliterisme. Ia didukung dengan berbagai instrumen politik partai berideologi radikal yang bertujuan mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat. Pada prakteknya, terjadi *genocide* yang dilakukan oleh pemimpin totaliterisme Hitler dan Stalin pada Perang Dunia II. Hal tersebut menggoda negara-negara demokrasi liberal untuk menggunakan strategi militer, di mana Dresden dan Heroshima, yang pada saat itu, juga merupakan *genocide*.

Abad ke 19 melahirkan banyak teori-teori pembangunan dan kemajuan yang menghubungkan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Negara-negara di Eropa sangat terkenal dengan tatanan yang lalim dan tidak berkemanusiaan, misalnya *Holocaust* muncul dari negara dengan ekonomi industrial yang paling maju dan merupakan salah satu negara bangsa di Eropa yang terkenal sebagai bangsa berpendidikan

dan berbudaya. Faktanya, kejahatan-kejahatan kemanusiaan abad ke 19 di tanah Eropa datang dari negara yang memiliki kemajuan industrial, berpendidikan, dan berbudaya. Nazisme kemudian menjadi lawan bagi negara-negara demokrasi liberal dalam pertarungan ideologi dan strategi-strategi militer.

Selanjutnya, dunia dihadapkan pada perang ideologi. Demokrasi liberal telah ditantang oleh dua pesaing ideologi yaitu fasisme dan komunisme – mereka menawarkan berbagai tujuan yang berbeda untuk menjadi tatanan masyarakat yang baik. Amerika Serikat dihadapkan pada pesimisme atas ideologinya, kebenaran yang nyaris universal dalam analogi alternatif komunisme totaliterisme bagi demokrasi liberal. Pada 1970, Henry Kissinger, ketika menjadi Menteri Luar Negeri, memperingatkan masyarakat di negaranya, “untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita menghadapi kenyataan yang sebenarnya, bahwa ancaman (komunisme) tidak pernah berakhir, sehingga kita harus belajar melakukan kebijakan luar negeri seperti negara lain, tanpa menghindari dan tanpa henti, karena kondisi ini tidak akan hilang (Fukuyama, 2004).”

Pernyataan Kissinger telah melemahkan kekuatan tatanan demokrasi liberal. Menurutnya bahwa perang ideologi ini bisa ditengahi dengan menerima fakta bahwa mereformasi struktur politik dan sosial yang fundamental dari ancaman musuh seperti Uni Soviet adalah suatu yang utopia. Pada tahun 1983, di saat kehancuran ideologi negara bangsa mulai meluas, Jean Francois Revel, menyatakan bahwa “demokrasi mungkin berubah menjadi suatu kecelakaan sejarah....” Kaum kanan dalam posisi dilematis, di mana, tawaran ideologi komunis menjadi alternatif bagi negara liberal demokratis.

Sebelum tahun 1980-an, negara bangsa di dunia merasakan kejahatan-kejahatan ideologi yang dilakukan oleh kaum kiri dan kanan. Di Asia Timur dikenal dengan perang Korea yang memisahkan diri secara politik hingga hari ini – Korea Utara dan Korea Selatan. Di Asia Tenggara dikenal dengan perang paling mengerikan yaitu perang Vietnam, di mana Vietnam Utara dijadikan sebagai perluasan teori domino Uni Soviet dan Vietnam Selatan dijadikan sebagai wilayah *containment policy* Amerika Serikat. Di belahan dunia lain juga mengalami hal serupa, di mana pergolakan perang dingin mengantarkan kita pada pesimisme historis tentang tatanan perdamaian dunia.

Dunia, khusus masyarakat Amerika Serikat dikejutkan dengan kehancuran negara-negara Uni Soviet pada 1980-1990. Di mana, harapan akan analogi universal dalam tatanan demokrasi liberal berpeluang memenangkan permanensi komunisme Uni Soviet. Kemenangan Amerika Serikat atas Uni Soviet dalam perang ideologi mengawali revolusi demokrasi liberal di seluruh dunia. Ini merupakan suatu kedatangan terbesar sepanjang sejarah. Di mana, dunia dikejutkan dengan asumsi-asumsi kebebasan dan hak asasi manusia serta sistem pemerintahan yang terorganisir secara demokratis. Krisis dan pesimis intelektual mulai bangkit dalam temuan-temuan riset yang terproyeksikan pada kemenangan kaum kanan. Buku pertama datang dari ahli sosiologi tersohor yaitu Francis Fukuyama berjudul “*The End of History and The Last Man*.” Membangun diskursus persamaan dalam revolusi demokrasi liberal ke seluruh dunia.

Definisi demokrasi mulai disamakan mengikuti Amerika Serikat, Fukuyama mengungkapkan bahwa definisi demokrasi berangkat dari karya klasik Lord Bryce, yang

mendefinisikan demokrasi secara terbatas pada tiga hal; hak-hak sipil, pembebasan dan kontrol negara terhadap warga negara dan hak miliknya; hak-hak beragama, pembebasan dan pengawasan terhadap opini-opini keagamaan; dan hak-hak politik, kebebasan dan pengawasan dalam persoalan-persoalan yang tidak memiliki pengaruh merusak dan kebebasan pers (Fukuyama, 2004). Selanjutnya, berbagai definisi ditetapkan dalam *American Bill of Rights* dan menjadi rezim kebenaran bagi tatanan demokrasi di dunia.

Tatanan demokrasi liberal mulai mengembara di seluruh dunia dan mendapatkan konsensus di berbagai negara di dunia. Dominasi, hegemoni, dan pendisiplinan terhadap pengetahuan demokrasi liberal dinormalkan oleh berbagai institusi yang diciptakan untuk mengontrol berjalannya tatanan global, seperti *global governance* dan *global civil society*. Model penjarahan ekonomi modern pun diterapkan, dengan membuat “penjara bukan penjara” bagi negara bangsa yang eksis dalam perdagangan dan keuangan global. Untuk mewujudkan perdagangan bebas dan integrasi keuangan global maka dikembangkan WTO, IMF, dan WB. Ia disebut sebagai instrumen untuk menjalankan *Structural Adjustment Programs* (SAPs) yang terdapat dalam *Washington Consensus*. Ia juga disebut sebagai gurita neoliberalisme yang bertujuan mencengkram negara bangsa untuk melakukan deregulasi dan privatisasi BUMN.

Tidak berlangsung lama, berbagai kritikan datang dari berbagai negara bangsa dan kelompok-kelompok resisten. Pada tahun 1999, terjadi aksi global untuk memprotes konferensi tingkat tinggi WTO, ia dikenal dengan aksi anti globalisasi “*Battle of Seattle*.” Tak terelakan lagi, bahwa aksi anti kapitalisme datang dari negara penjaga kapitalisme.

Selanjutnya, pada tahun 2001, Amerika Serikat dikagetkan dengan kejadian 9/11. Hal ini membenarkan yang disampaikan Kissinger, namun dalam aksi yang berbeda – bukan datang dari komunisme. Tetapi datang dari kelompok-kelompok yang menamakan “anti Amerika Serikat.” Ia menciptakan sejarah tak terlupakan, di mana terjadi pembajakan 4 pesawat dalam aksi terorisme. Garda terdepan tatanan demokrasi liberal dikejutkan dengan aksi non-negara – pertarungan ideologi belum selesai. Selanjutnya, anti kapitalisme datang dari gerakan *Wall Street* pada tahun 2011, dengan tanda identitas “*we are 99%*,” yang kemudian menjadi gerakan global di seluruh dunia. Gerakan *Occupy Wall Street* adalah gerakan global anti kapitalisme yang mengkritik ketidakadilan dalam praktik sistem kapitalisme. Dewasa ini, tatanan Amerika Serikat sebagai penjaga perdamaian dunia kembali dipertanyakan relevansinya.

Tantangan lebih spektakuler datang dari poros Cina di bidang Ekonomi. Kebijakan luar negeri Cina “*peaceful development*” merumuskan agenda besar di bawah “*Belt and Road Initiative* (BRI).” Program ini mampu menjadi alat ekspansi Cina di berbagai kawasan. Tatanan AS diperhadapkan pada situasi perang dagang dengan Cina. Banyak ahli bermunculan untuk menganalisis kebangkitan Cina sebagai ancaman tatanan ekonomi kapitalisme. Kendati demikian, bahwa kekuasaan hegemoni dunia masih diyakini dipegang oleh Amerika Serikat. Namun, dalam pembangunan kawasan, Cina terlihat di aktif dan melakukan distribusi sumber daya yang besar. Hal tersebut menguatkan argumentasi bahwa Cina mampu menggerakkan mesin kuasa hegemoni kawasan.

Ketika masyarakat dunia masih berfokus pada keajaiban kebangkitan Cina dan perang dagang, Rusia muncul dengan menggunakan strategi militer untuk membendung Amerika Serikat di Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina merupakan tantangan Amerika Serikat dalam mengaktifkan strategi pakta tradisionalnya, NATO, untuk menjaga terjadinya pendudukan Rusia di Ukraina. Karena secara geopolitik, Ukraina adalah negara yang strategis dalam mengimbangi kekuatan Rusia di Eropa. Keberanian Rusia melawan Amerika Serikat secara terbuka, menempatkan ia sebagai negara yang harus diperhitungkan. Deretan ancaman yang berasal dari Cina dan Rusia menunjukkan kebangkitan permanensi komunisme setelah tiga dekade tatanan dunia dikuasai kapitalisme dan demokrasi liberal Amerika Serikat.

Selain itu, pengetahuan terbaru datang dari perkembangan industri sangat maju, *internet of thing*. Tampak fenomena seperti; kecepatan viralitas, palsu terlihat asli, integrasi informasi, integrasi jaringan sosial global, identitas jaringan, integrasi ekonomi jaringan, moral jaringan, gaya hidup jaringan, masyarakat jaringan, dan mengarah pada negara jaringan. Filsuf geo-antropologi tersohor, David Harvey, menyebutkan bahwa "*the annihilation of space by time*." Terjadi kehancuran batas antara ruang dan waktu yang memungkinkan masyarakat dunia tidak dibatasi oleh kehadiran fisik. Era internet menjadi tak terelakan untuk membentuk tatanan dunia baru.

Sejarawan Inggris, Arnold Toynbee, menyebutkan bahwa sejarah peradaban pada tahapan tertentu akan mengalami pembusukan dan terjadi disintegrasi. Pada tahapan peradaban ini, manusia mengalami pembosanan atas keteraturan, sehingga pertumbuhan melambat dan membusuk.

Toynbee memberikan sinyal bahwa tidak ada peradaban yang mampu bertahan sepanjang sejarah umat manusia. Akan terjadi keterputusan dalam kemelekatan sejarah yang membosankan. Namun, dari berbagai konfirmasi teoritis tersebut memunculkan dua argumen yang terbuka untuk diperdebatkan, Pertama, fakta membuktikan bahwa tatanan global masih didominasi oleh Amerika Serikat; Kedua, *the last Man* tersebut memasuki penyakit “disfungsi ereksi atau impotensi.”

Mengamati berbagai fenomena yang terjadi akibat dari tatanan kapitalisme dan demokrasi liberal, kritik tajam yang ditujukan kepada Amerika Serikat, di mana, banyak negara mulai meragukan signifikansi Amerika Serikat dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, berbagai ancaman tersebut tidak mengubah tujuan Amerika Serikat yaitu revolusi liberal di seluruh dunia. Bahwa ketidakaturan dunia disebabkan karena sistem yang fasis dan totaliter, sehingga dunia membutuhkan “penyelamat” dengan slogan “*liberty*.” Hasrat ini termanifestasi dalam setiap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bahwa hanya kapitalisme dan demokrasi liberal yang mampu memberikan kemakmuran dan menjaga keteraturan dunia.

Fukuyama mengonfirmasi bahwa terjadi diskontinuitas sejarah kuasa dan pengetahuan, di mana, Amerika Serikat pemenang perang ideologi akan menjadi aktor peradaban kapitalisme dan demokrasi liberal. Doyle juga meyakini bahwa negara-negara di dunia akan meniru demokrasi Amerika Serikat untuk mewujudkan perdamaian. Ini merupakan ekspresi kekuasaan global melalui pengkodean logosentrisme. Ia dijalankan melalui mekanisme komplikasi untuk mendapatkan konsensus pengetahuan. Bahwa

pengetahuan membentuk kuasa, dan kuasa menjaga perdamaian dunia – hanya jika menganut demokrasi liberal Amerika Serikat.

Berangkat dari karya *World Order* (Kissinger 2014), pemikiran Henry Kissinger memiliki bobot khusus karena dibentuk oleh pengalamannya sebagai diplomat, akademisi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, serta Penasihat Keamanan Nasional di bawah kepemimpinan Richard Nixon dan Gerald Ford, sekaligus penerima Nobel Perdamaian tahun 1973. Kissinger memandang bahwa dunia tidak pernah berada dalam satu tatanan tunggal, melainkan terdiri dari berbagai tatanan yang hidup berdampingan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa satu-satunya tatanan yang memiliki klaim penerimaan universal adalah tatanan Westphalia, yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan dan negara bangsa. Dalam kerangka ini, peran Amerika Serikat tampil sentral sebagai aktor yang menjaga sekaligus membentuk keberlanjutan tatanan tersebut. Perspektif ini kemudian diperkaya dengan pemikiran Andrew Hurrell dalam *On Global Order* (Hurrell 2007), yang mengulas secara kritis dinamika masyarakat global serta berbagai ketegangan yang muncul akibat ketimpangan dan ketidakadilan dalam tatanan global kontemporer.

Henry Kissinger menuliskan bahwa tidak pernah ada tatanan dunia yang benar-benar global. Keteraturan dewasa ini merupakan pengaturan klasik yang sudah diatur pada perjanjian Westphalia 1648, di mana, berakhirnya perang 30 tahun dan mengawali peradaban negara bangsa. Perjanjian tersebut diselenggarakan tanpa keterlibatan atau bahkan tanpa kesadaran dari sebagian besar benua atau peradaban lain. Kissinger menegaskan bahwa para peserta yang kelelahan

perang bertemu untuk menentukan serangkaian pengaturan yang akan menghentikan pertumpahan darah. Persatuan agama telah retak seiring dengan bertahannya dan menyebarnya Protestanisme; Keberagaman politik melekat pada jumlah unit politik otonom yang berjuang hingga hasilimbang.

Dia juga menuliskan bahwa perdamaian Westphalia mencerminkan akomodasi praktis terhadap kenyataan, bukan wawasan moral yang unik. Hal ini bergantung pada sistem negara-negara merdeka yang tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan mengawasi ambisi satu sama lain melalui keseimbangan kekuasaan secara umum. Di mana, tidak ada rezim kebenaran yang universal mengatur perilaku negara. Negara diberikan otonomi dalam mengatur kebenarannya, sehingga keteraturan tidak sentralistik, namun terpecah-pecah dan otonom, tanpa adanya paksaan. Perbedaan yang otonomi tersebut memberikan dampak pada penyesuaian keseimbangan kekuasaan yang kini dianggap wajar dan diinginkan, ambisi para penguasa akan ditempatkan secara berlawanan satu sama lain, setidaknya secara teori akan membatasi ruang lingkup konflik.

Mereka yang terlibat dalam perundingan perjanjian Westphalia tidak pernah menyangka bahwa naskah perdamaian yang menciptakan negara bangsa secara otonom akan menjadi keteraturan global saat ini, di mana negara-negara di luar Eropa kemudian menjadikan negara bangsa sebagai bentuk keteraturan dalam pengorganisasian pemerintah. Misalnya Rusia dan negara-negara Asia lainnya tidak menjadi perunding dalam perjanjian Westphalia, namun dewasa ini menjadi kebutuhannya dalam keteraturan pemerintahan lokal. Ide besar tatanan negara bangsa saat itu

tidak didorong oleh teknologi informasi abad 21, sehingga penyebaran yang tidak disangkakan menyebar ke seluruh dunia. Informasi yang signifikan dalam perundingan Westphalia tidak terdistribusikan dengan baik ke dunia luar Eropa. Keteraturan tersebut hanya berlaku di tanah Eropa, sehingga tatanan tersebut layak disebut sebagai tatanan Eropa. Akhirnya dunia mendefinisikan secara sendiri-sendiri perjanjian tersebut untuk ditiru, sehingga memberikan konsekuensi negatif dan ancaman. Selain itu di Cina memiliki konsep keteraturan yang berbeda dengan konsep kedaulatan negara bangsa. Kissinger menyebutkan:

Di ujung benua Eurasia yang berseberangan dengan Eropa, Cina merupakan pusat dari konsep keteraturan yang bersifat hierarkis dan secara teoritis universal. Sistem ini telah beroperasi selama ribuan tahun—sistem ini sudah ada ketika Kekaisaran Romawi memerintah Eropa sebagai satu kesatuan—yang tidak mendasarkan diri pada kesetaraan kedaulatan negara-negara, namun pada anggapan bahwa jangkauan Kaisar tidak terbatas. Dalam konsep ini, kedaulatan dalam pengertian Eropa tidak ada, karena Kaisar memegang kendali atas "Semua yang Ada di Bawah Langit." Dia adalah puncak hierarki politik dan budaya, berbeda, dan universal, yang menyebar dari pusat dunia di ibu kota Cina ke seluruh umat manusia. Yang terakhir ini diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkat barbar, sebagian bergantung pada penguasaan mereka terhadap tulisan Cina dan institusi budaya (sebuah kosmografi yang bertahan hingga era modern). Cina, dalam pandangan ini, akan menata dunia terutama dengan cara membuat masyarakat lain kagum dengan kemegahan budaya dan budayanya karunia ekonomi, menarik mereka ke dalam hubungan yang dapat dikelola untuk menghasilkan tujuan harmoni di bawah langit.

Tatanan Cina sebelumnya sudah memiliki tatanan yang melegitimasi kekuasaan Kaisar yang memiliki wilayah kekuasaan tidak terbatas. Konsep tatanan Cina saat itu sangat hierarki secara politik dan budaya. Banyak yang mengagumi

tatanan Cina di bawah konsep kekaisaran. Konsep ini dipengaruhi oleh bacaan-bacaan tradisional Cina misalnya, konfucionisme yang mengadopsi harmoni di bawah satu langit. Tatanan Cina yang menempatkan kaisar sebagai simbol berdaulat dari satu negara membawa peradaban ini menjadi besar. Kedauletan Westphalia adalah versi perundingan yang terjadi di Eropa, sedangkan di Cina menyebutnya Kaisar, sebagai kedauletan tertinggi suatu negara. Ia menunjukkan bahwa peradaban sudah terbentuk di Cina sebelum perundingan Westphalia di Eropa. Selain itu terdapat peradaban Islam di antara wilayah Eropa dan Cina. Kissinger menyebutkan:

Ketika Eropa membangun tatanan multinegara, Kekaisaran Ottoman yang berbasis di Turki menghidupkan kembali klaim atas pemerintahan tunggal yang sah dan menyebarkan supremasinya ke seluruh jantung Arab, Mediterania, Balkan, dan Eropa Timur. Mereka sadar akan terbentuknya tatanan antarnegara di Eropa; mereka menganggapnya bukan sebuah model melainkan sumber perpecahan yang dapat dieksploitasi untuk ekspansi Utsmaniyah ke arah barat. Seperti yang ditegur oleh Sultan Mehmed sang Penakluk kepada negara-negara kota di Italia yang mempraktikkan versi awal multipolaritas pada abad ke-15, Kalian adalah 20 negara bagian... kalian berselisih paham di antara kalian sendiri... Harus ada hanya satu kerajaan, satu agama, dan satu agama. satu kedauletan di dunia.

Tatanan Islam pada abad ketujuh, telah menyebar ke tiga benua dalam gelombang pemuliaan agama dan ekspansi kekaisaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menyatukan dunia Arab, mengambil alih sisa-sisa Kekaisaran Romawi, dan memasukkan Kekaisaran Persia, Islam menguasai Timur Tengah, Afrika Utara, sebagian besar Asia, dan sebagian Eropa. Versi tatanan universalnya menganggap

Islam ditakdirkan untuk meluas ke wilayah perang. Sementara itu, di seberang Atlantik, fondasi visi tatanan dunia yang berbeda sedang diletakkan di “Dunia Baru.”

Saat perang dan konflik terjadi di Eropa pada abad ke 17, bangsa Puritan di seberang Atlantik berjuang membebaskan diri mereka sebagai kegenapan rencana Tuhan dengan “tugas alam liar” yang diyakini oleh mereka bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari struktur otoritas yang sudah mapan. Gerakan mereka terkonsentrasi pada pemahaman kebenaran yang dikotbahkan oleh Gubernur John Winthrop pada tahun 1630 di atas kapal yang menuju pemukiman Massachusetts, sebuah “kota di atas bukit.” Hal tersebut memotivasi gerakan mencapai keadilan atas prinsip-prinsip kebebasan. Dalam perspektif Amerika Serikat bahwa tatanan dunia, perdamaian dan keseimbangan akan terjadi secara alami atas kehendak Tuhan. Sehingga perang di dunia akan dikesampingkan. Atas dasar tersebut, bangsa Amerika meyakini bahwa kebijakan luar negeri bukanlah mengejar kepentingan nasional Amerika, melainkan kepentingan dunia, yaitu perdamaian dunia. Bangsa Amerika Serikat meyakini bahwa suatu saat nanti, ia akan menjadi aktor utama dalam membangun tatanan dunia yang dirancang Eropa. Prinsip yang dimaksud adalah demokrasi.

Kendati demikian, prinsip-prinsip yang lahir pada perjanjian Westphalia merupakan dasar keteraturan yang akhirnya disetujui dan diakui negara-negara bangsa sebagai tatanan dunia. Ia menyebar ke seluruh dunia, bangsa-bangsa kemudian meninggalkan konsep kenegaraan yang didasarkan pada Kaisar atau pada keyakinan agama, dan mengadopsi prinsip-prinsip kedaulatan versi Westphalia. Pada prakteknya, sekalipun mereka tidak mengakui kemerdekaan versi

Westphalia pada bangsa-bangsa yang dijajah, namun, jika terjadi pembentukan negara bangsa, maka yang ditawarkan adalah kedaulatan versi Westphalia.

Produk Westphalia yang merupakan tatanan global memberikan konsekuensi dalam membatasi karakter dunia yang anarki dan dirancang untuk mendorong perdagangan bebas dan integrasi keuangan internasional yang stabil. Ia disusun sebagai sistem yang dapat diterima di segala penjuru dunia. Sistem negara bangsa ini bukan lagi tentang sektor politik, namun mencakup semua aspek, sehingga diyakini mampu bertindak dalam menjaga perdamaian dunia. Lembaga-lembaga di dalam negara bangsa lebih bersifat netral bagi interaksi berbagai masyarakat. Pada perkembangannya, Eropa yang adalah aktor perunding terjadinya perjanjian Westphalia berbalik menentanginya, dan menciptakan konsep keseimbangan kekuatan berbasis integrasi kawasan, yaitu Uni Eropa. Di Timur Tengah bermunculan perlawanan terhadap konsep negara bangsa melalui jihadis di kedua kubu; Sunni dan Syiah. Mereka menolak batas-batas negara dianggap tidak sah dalam milisi teroris.

Pada awalnya Amerika Serikat memiliki posisi yang dilematis, di satu sisi mendukung sistem Westphalia, namun, di sisi lain, menegaskan bahwa keseimbangan kekuatan dan non intervensi dalam urusan dalam negeri sebagai hal yang tidak bermoral dan kuno. Amerika Serikat dengan disiplin menegaskan relevansi universal dalam membangun nilai-nilai yang menjunjung perdamaian dunia. Sistem tatanan dunia apa pun, agar berkelanjutan, harus diterima secara adil, tidak hanya oleh para pemimpin, tetapi juga oleh warga negara. Hal ini harus mencerminkan dua kebenaran: ketertiban tanpa

kebebasan, bahkan jika ditopang oleh keagungan sesaat, pada akhirnya menciptakan keseimbangannya sendiri; namun kebebasan tidak dapat dijamin atau dipertahankan tanpa kerangka ketertiban untuk menjaga perdamaian. Ketertiban dan kebebasan, kadang-kadang digambarkan sebagai dua kutub yang berlawanan dalam spektrum pengalaman, seharusnya dipahami sebagai saling bergantung.

Selanjutnya, Hurrell menegaskan respon masyarakat global terhadap tatanan dunia yang berubah-ubah akibat globalisasi. Dunia kontemporer adalah dunia yang penuh dengan dilematis politik dan moral. Kedua hal tersebut yang harus dihadapi masyarakat internasional. Menurutnya, dalam tatanan global abad 21, masyarakat menghadapi tiga hal: memenuhi kepentingan bersama; mengelola kekuasaan yang tidak setara; dan memediasi perbedaan dan konflik. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa tatanan dunia sangat tidak stabil dalam urusan keadilan, sehingga Hurrell memberikan rumus-rumus untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Persoalannya kebanyakan berada pada negara-negara belum mapan secara politis, di mana terdapat ketimpangan yang ekstrim akibat tatakola pemerintahan dan pengambilan keputusan tidak didasarkan pada kesetaraan. Logika kerja sama yang terus-menerus dibangun dalam hubungan internasional tidak selalu memiliki keuntungan sama.

B. Diskursus Persamaan

Kita harus berhenti di sini beberapa saat, di mana keserasian dan kedekatan riset dengan tujuan pengembangan pengetahuan selalu mengacu pada landasan teoritik berdasarkan sistem pemikiran yang sudah ada sejak lama,

PROFIL PENULIS



Arthuur Jeverson Maya (AJM)

adalah akademisi dan penulis yang menaruh perhatian pada studi kekuasaan, negara, dan pembentukan tatanan global melalui pendekatan genealogi dan diskursif. Karya-karyanya bergerak di persimpangan antara teori politik, hubungan internasional, dan kritik terhadap narasi besar modernitas,

dengan fokus pada bagaimana negara, kedaulatan, dan subjek politik dibentuk melalui sistem tanda dan rezim kebenaran.

Sebagai penulis, AJM tidak sekadar mendeskripsikan fenomena politik, tetapi berupaya menelusuri asal-usul simbolik dan teologis dari kekuasaan modern, mulai dari mitologi, iman, hingga negara bangsa sebagai tubuh baru tempat kedaulatan bersemayam. Pendekatan ini menjadikan tulisannya bersifat reflektif, kritis, dan sering kali menempatkan negara bukan sebagai entitas netral, melainkan sebagai konstruksi historis yang sarat makna dan kuasa.

Sejumlah buku telah ditulis AJM dalam kerangka pemikiran tersebut, di antaranya *Sistem Intrusif dan Kedaulatan*, *Genealogi Terorisme*, *Amerika Serikat dan Rezim Kebenaran*, serta *Kuasa Kekuasaan*. Karya-karya ini membentuk satu rangkaian pemikiran yang saling terhubung, di mana *Genealogi Negara Bangsa* hadir sebagai kelanjutan sekaligus pendalaman atas proyek intelektualnya dalam membaca

negara sebagai hasil sejarah panjang iman, diskursus, dan kekuasaan.

Melalui tulisan-tulisannya, AJM berupaya membuka ruang tafsir baru terhadap politik global dan negara bangsa bukan sebagai fakta yang sudah selesai, tetapi sebagai narasi yang terus diproduksi, dipertahankan, dan diperebutkan maknanya.



GENEALOGI NEGARA BANGSA

Negara bangsa kerap diperlakukan sebagai bentuk politik yang alamiah, rasional, dan final dalam sejarah modern. Namun asumsi tersebut menyembunyikan proses panjang di mana kekuasaan, pengetahuan, dan legitimasi diproduksi melalui lapisan-lapisan diskursus yang saling bertaut. Genealogi Negara Bangsa menawarkan pembacaan kritis atas negara bukan sebagai entitas netral, melainkan sebagai formasi historis yang lahir dari transformasi simbolik dan institusional atas otoritas.

Dengan menggunakan pendekatan genealogi, buku ini menelusuri bagaimana tatanan politik dibentuk melalui pergeseran cara kekuasaan dilegitimasi dari mitologi, iman, dan kosmologi awal, menuju negara kota, imperium, hingga negara modern yang mengklaim dirinya sekuler. Negara dipahami sebagai rezim kebenaran yang bekerja melalui hukum, kedaulatan, dan institusi, sekaligus sebagai medium di mana keyakinan kolektif dan relasi kuasa dilembagakan.

Buku ini mengkaji negara bangsa sebagai ruang artikulasi antara kontinuitas dan diskontinuitas historis, antara klaim rasionalitas modern dan warisan simbolik masa lalu. Dengan demikian, Genealogi Negara Bangsa mengundang pembaca untuk membaca ulang negara sebagai konstruksi yang terus diproduksi, bukan sebagai fakta politik yang selesai, melainkan sebagai medan perebutan makna, legitimasi, dan kekuasaan dalam tatanan global kontemporer.



ukipressdigital.uki.ac.id



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-634-7589-09-5



9

786347

589095